



LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
[LAKIP]

*Tahun Anggaran 2009*

KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS  
KOTA SUKABUMI

Jalan R.Syamsudin, SH. No. 25 Sukabumi

# **PENETAPAN KINERJA TAHUNAN ( PKT )**

TAHUN ANGGARAN 2010



KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS  
KOTA SUKABUMI

**Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25 Sukabumi**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

TAHUN ANGGARAN 2010



KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS

KOTA SUKABUMI

**Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25 Sukabumi**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana digariskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

Setiap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap OPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi 2003-2008, dan dengan telah dibentuknya Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja yang di jadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan kemajuan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi di bidang pengolahan data elektronik, arsip daerah dan humas telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk LAKIP tahun 2009 yang dalam penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **1.2. Isu Strategis**

Dalam menunjang pencapaian visi Kota Sukabumi “ *sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat* ”

*berlandaskan iman dan taqwa*”, dan dengan pendekatan visi Walikota/Wakil Walikota Sukabumi “ *Dengan iman dan taqwa mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera dengan dilandasi filosofi sidiq, amanah, fatonah dan tabligh*”, guna terciptanya masyarakat yang aman, tertib, damai, adil sehat sejahtera lahir dan bathin dengan ridha Allah SWT, maka Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas memiliki prioritas kegiatan :

- a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui Jaringan koneksitas website kota sukabumi ([www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id));
- b. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komunikasi melalui pemeliharaan Jaringan koneksitas website kota sukabumi ([www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id));
- c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
- d. Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah;
- e. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Pengumpulan Data;
- g. Pendataan dan Penataan Arsip Daerah;
- h. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- j. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

### **1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas**

#### **1.3.1. Kedudukan Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas**

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas, di pimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.3.2. Fungsi Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas**

Dalam menunjang pencapaian visi kota “*sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa*”, dan dengan pendekatan visi Walikota “*dengan iman dan taqwa mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera dengan dilandasi filosofi sidiq, amanah, fatonah dan tabligh*”.guna terciptanya masyarakat yang aman, tertib, damai, adil sehat sejahtera lahir dan bathin dengan ridha Allah SWT, maka pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas harus mampu melakukan :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas;
2. Pelayanan di bidang pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
3. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasannya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
4. Peliputan dan pemberitaan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah Daerah;
5. Penyelenggaraan fasilitas dan promosi Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
6. Pembinaan terhadap seluruh perangkat kantor.

### **1.3.3. Tugas Pokok Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas**

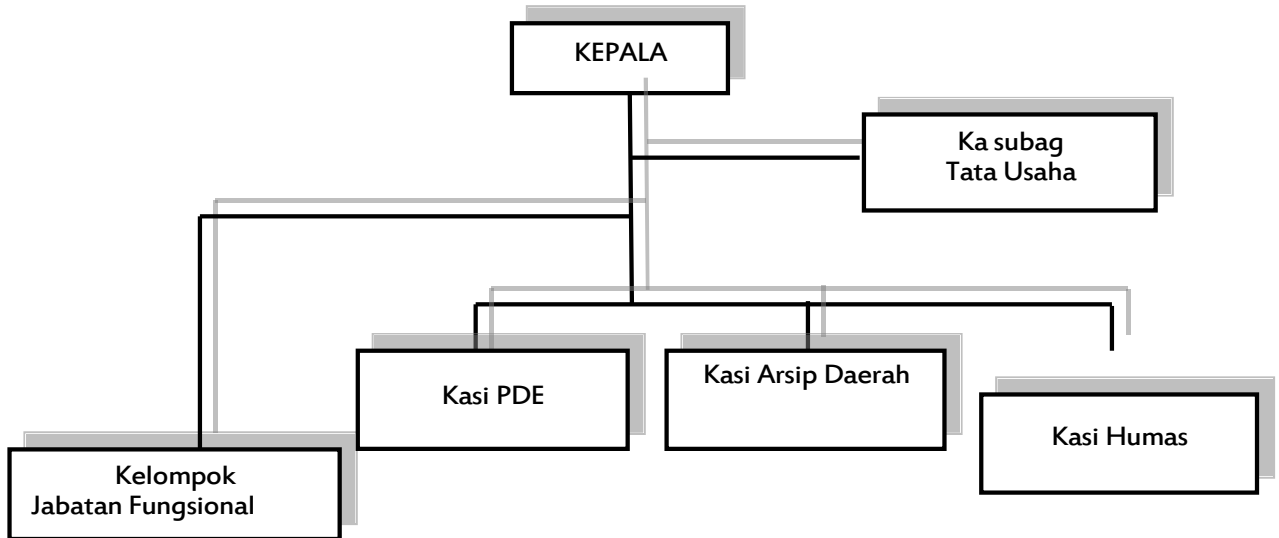
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di uraikan di atas, Kepala Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah di dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengolahan data elektronik, arsip daerah dan Humas baik dalam perumusan kebijakan umum maupun kebijaksanaan teknis;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kantor;
3. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor ;
4. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
5. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kantor dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
6. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pengolahan data elektronik, arsip daerah dan Humas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas;
8. Mengkaji dan mengoreksi perizinan dan rekomendasi di bidang pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas;
9. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pengolahan data elektronik, arsip Daerah dan Humas;
10. Mempertanggung jawabkan tugas Kantor secara taktis operasional dan teknis administrasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah.

**1.3.4. Struktur Organisasi**

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan PDE, Arsip Daerah dan Humas maka berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2008, Kepala Kantor di bantu oleh Subag Tata Usaha, Seksi Pengolahan Data Elektronik, Seksi Arsip Daerah dan Seksi Humas serta Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS  
KOTA SUKABUMI**



Keterangan : Perda Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2008.

**1.4. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP**

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 18 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Sukabumi tahun 2001-2005;

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2003 tentang Renstra Kota Sukabumi tahun 2003-2008.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan.

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Sukabumi, serta secara administratif melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun LAKIP tahun 2007 yang mengacu pada Rencana Strategis Kota Sukabumi tahun 2003-2008 dengan susunannya dirumuskan dalam perencanaan jangka pendek dengan gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan kantor Infokom, PDE dan Arsip Daerah yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas atas dasar pagu anggaran yang disetujui oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif dalam sebuah dokumen APBD tahun 2007.

Sebelum mengemukakan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi perlu diawali dengan memahami Renstra Kota Sukabumi tahun 2003-2008, yaitu :

1. Melakukan analisis pertumbuhan penduduk, ekonomi dan proyeksi pendapatan daerah;
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan pokok pembangunan dengan menggunakan SWOT analysis;
3. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi;
4. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan;
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

Dengan Renstra Kota tahun 2003-2008, Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi berkewajiban untuk menata dengan baik tentang arus informasi dan proses komunikasi agar mengalir dengan lancar, jangan sampai ada yang tersumbat, baik

informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat ataupun dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan informasi dan komunikasi yang tertata dengan baik akan mampu menyuburkan tata kehidupan yang harmonis, seimbang, demokratis dan pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagai prasyarat suksesnya pembangunan.

## **2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

### **2.2.1 Visi**

Agar mampu mengimplementasikan visi dan misi Kota Sukabumi maka telah di rumuskan visi Infokom sebagai berikut : ***“ Terwujudnya informasi yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya dalam memfasilitasi masyarakat pengguna informasi dan komunikasi.”***

### **2.2.2.Misi :**

- a) Mewujudkan Penataan dokumen dengan sistem kearsipan yang relevan dengan perkembangan iptek;
- b) Menyediakan data dan informasi lisan, tulisan maupun dalam bentuk data elektronik yang berbudaya dan bermartabat bagi insan pers dan masyarakat pengguna informasi lainnya;
- c) Memfasilitasi pembentukan pendapat umum yang seimbang dan setara antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan industri pers melalui kegiatan sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

### **2.2.3.Tujuan :**

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan penataan sistem pengelolaan arsip dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kearsipan, melalui kegiatan pembekalan dan pelatihan bagi para pengelola kearsipan diseluruh SKPD ;
- b) Memfasilitasi Manajemen Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan sehingga akuntabilitas publik senantiasa terjaga dan terpelihara;
- c) Mendukung dan Mendorong masyarakat pengguna informasi dan komunikasi untuk dengan mudah mengakses informasi melalui media internal, media massa cetak maupun elektronik termasuk akses website Pemerintah Kota Sukabumi.

### **2.2.4.Sasaran :**

- a) Meningkatnya presentase Penanganan Arsip yang sesuai dengan aturan;
- b) Meningkatnya presentase SKPD yang telah akses ke jaringan internet;
- c) Tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah bagi masyarakat.

### 2.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi ditujukan pada pencapaian visi misi organisasi guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Sukabumi melalui upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan baik administrasi manajerial maupun teknis operasional dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dasar (data base) dari berbagai potensi baik pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dari aspek pemerintahan dan agama, ekonomi, tata ruang, infrastruktur serta sosial budaya;
2. Pengolahan dan analisis data dasar sehingga menjadi data informasi yang akurat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam menetapkan kebijakan;
3. Memaksimalkan fungsi dan peran media massa (elektronik, cetak) melalui kerjasama dan kemitraan dalam mendukung arah kebijakan umum pemerintah Kota Sukabumi, termasuk revitalisasi RSPD dan Majalah Berita Kota;
4. Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dalam penataan dan pembinaan menyangkut penyiaran, pemberitaan, rekaman, sehingga dapat diberdayakan seefektif dan seoptimal mungkin;
5. Meningkatkan peran dan fungsi kehumasan sebagai juru bicara pemerintah dalam penyebarluasan informasi;
6. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan koneksitas website;
7. Penataan system pengelolaan kearsipan daerah secara terpadu.

### 2.4. Prioritas Kegiatan

Prioritas program/kegiatan diarahkan pada pola pelayanan informasi dengan standar minimal dengan tujuan umum memfasilitasi manajemen pemerintah daerah yang transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan Kota Sukabumi sehingga akuntabilitas publik senantiasa terjaga dan terpelihara, untuk tahun 2009 prioritas kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui jaringan koneksi berbasis Website [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id), melalui jaringan WAN (Wireless Area Network) dan LAN ( lokal Area Network) Koneksi Jaringan terpasang pada tahun 2009 yakni di Kantor Sekretariat KPUD Kota Sukabumi dan di 4 (empat) SKPD lainnya yakni Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Perpustakaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komunikasi melalui pemeliharaan jaringan koneksitas website Kota Sukabumi [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id);

3. Kerjasama informasi dan media massa meliputi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peliputan media massa, Liputan khusus, Leaflet, Selayang Pandang Kota Sukabumi dan Kaleidoskop tahun 2009;
4. Kerjasama informasi dan media massa meliputi penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui sebaran informasi Berita Kota dengan 12 edisi penerbitan;
5. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
6. Perbaikan sistem administrasi kearsipan melalui kegiatan pengumpulan data/ dokumen arsip seluruh OPD;
7. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah melalui pendataan dan penataan dokumen arsip daerah.

Adapun kegiatan tambahan selama tahun 2009 meliputi Belanja Administrasi umum terutama belanja barang dan jasa dan belanja operasi lainnya( belanja pegawai baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung).

## 2.5. Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi, ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas/professional dibidang pengolahan data elektronik, arsip daerah dan humas;
2. Adanya sistem informasi pembangunan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memungkinkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Terbentuknya komitmen dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang selaras, serasi, seimbang dan berbudaya;
4. Adanya produk dan jasa pelayanan informasi kepada masyarakat;
5. Terjalinnnya komunikasi timbal balik yang positif antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan stakeholders;
6. Tersedianya sarana, prasarana dan dana yang memadai;
7. Berjalannya tata kerja dan manajemen yang efektif, efisien dibidang pengolahan data elektronik, arsip daerah dan humas;
8. Terhimpunnya data potensi Kota Sukabumi dari masing-masing SKPD;
9. Meningkatnya peranan media massa sebagai mitra kerja dalam mendorong dan membentuk komitmen bersama dalam memajukan Kota Sukabumi;
10. Optimalisasi peran media informasi komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Sukabumi;

11. Terbina dan terkendalnya mekanisme penyebarluasan informasi dan /atau penyiaran, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sebagai OPD yang diberikan amanah wajib menyampaikan dimaksud.

Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan, baik dalam hal keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2009 beserta Indikatornya.

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi, misi Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kota Sukabumi dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja, program kegiatan yaitu melalui input, output, outcome, benefit dan impact dengan media pengukuran kinerja terdiri dari

- Formulir Rencana Strategis (RS);
- Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
- Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
- Formulir Analisis Efisiensi dan Efektifitas.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input) keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

### 3.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan kedalam:

- Kelompok indikator input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran indikator masukan

ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan;

- Kelompok indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan;
- Kelompok indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- Kelompok indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- Kelompok indikator impact ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian.

Dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kepala Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi tahun 2009, maka dapat diketahui dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, pada dasarnya telah dicapai dengan baik. Sementara dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) secara umum pencapaian target dari kegiatan yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan dengan baik.

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi Tahun 2003-2008. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 3.3.1. Sasaran dan Indikator 1 :

Sasaran 1 :  
Meningkatnya presentase Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang telah akses ke jaringan internet Pemerintah Kota Sukabumi.

Indikator Sasaran 1 :  
Presentase Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang telah akses ke jaringan internet Pemerintah Kota Sukabumi.

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah terkumpulnya data dasar (database) dari berbagai potensi secara lengkap dan menyeluruh sebagai bahan

pengembangan dan pengolahan. Sasaran ini dilaksanakan melalui satu program dengan 2 (dua) kegiatan yakni :

- 1) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan kegiatan :
  - a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi  
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkoneksi komunikasi data di 1 Sekretariat KPUD dan di 4 (empat) SKPD tahun 2009;
  - b) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komunikasi  
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jaringan website Kota Sukabumi [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id);

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.

**Tabel 3.3.1**  
**INDIKATOR SASARAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

NO	INDIKATOR SASAAN	Satuan	s.d. Tahun 2008			Tahun 2009			Evaluasi (+/-)
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Koneksi jaringan /cybercity di 4 SKPD TA 2006 [Bawasda; Dinas Tarlingkim; Kec. Cikole;Kec. Citamiang].	SKPD	40	4	10,0				
2.	Koneksi jaringan /Pusat Informasi Pasar di 4 SKPD => PPK-IPM TA 2006 [ Dinas Pendidikan; Perdagangan; Kesehatan; Pertanian ] **	SKPD	40	4	10,0				
3.	Koneksi jaringan cybercity di 7 SKPD, TA 2007 [ Dishub; Kantor Casip Kec. Lbr Situ; BKD; Kec. Warudoyong; Kec. Gunung Puyuh; Kec. Cibeureum; Kec. Baros ].	SKPD	40	7	17,5				
4.	Koneksi jaringan cybercity di 5 SKPD, TA 2008 [ Dinas Pol PP & Kesbang; Kebersihan; PMKB; Kantor KPO; Sostek.	SKPD	40	5	12,5				
	Jumlah		40	20	50,0				
5.	Koneksi jaringan WAN di KPUD dan 4 SKPD, TA 2009 [ Set. KPUD; Kantor Perpustakaan Umum Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Kel. Gunung Puyuh ]	SKPD				40	5	12,5	
<b>KUMULATIF</b>			<b>40</b>	<b>20</b>	<b>50,0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>62,5</b>	<b>+ 12,5</b>

- Catatan :
- a. Target Koneksitas yang ingin dicapai pada tahun 2008 sebesar 33,0 % [13 SKPD] dan tahun 2009 sebesar 50,0 % [ 20 SKPD]
  - b. Dari 40 SKPD yang ada, belanja modal Jaringan koneksi bersumber APBD yang dikelola Kantor PDE s.d. TA 2008 adalah 16 SKPD atau 40,0 % ditambah koneksi PIP bersumber PPK-IPM \*\*(BA. Penyerahan tanggal 12-12-2008) capaian kinerja menjadi 50,0 % jadi telah melebihi target sebesar + 7,0 %.dari target 33,0 % tahun 2008.
  - c. % Capaian Kinerja untuk tahun 2009 sebesar 62,5 % atau 25 SKPD telah terkoneksi jaringan internet Pemda Kota Sukabumi dan telah melebihi target yang ingin dicapai untuk tahun 2009 sebesar + 12,5 %.
  - d. Secara lengkap Akses Koneksi terhadap Jaringan Internet Pemerintah Kota Sukabumi dapat dilihat pada lampiran 1.

### 3.3.2. Sasaran dan Indikator 2 :

Sasaran 2 :  
Tersebar nya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah bagi masyarakat

Indikator Sasaran 2 :  
 a) Daya Pancar RSPD  
 b) Presentase Penyebaran Informasi

Indikator yang diharapkan dari sasaran ini adalah Terlaksananya hubungan kerjasama dan kemitraan dengan media massa baik cetak maupun elektronik disamping efektifnya siaran RSPD dan Majalah Berita Kota. Sasaran ini dilaksanakan melalui program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tersebarluasnya informasi pembangunan Kota Sukabumi. Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran Memaksimalkan fungsi dan peran media massa (cetak/elektronik) melalui pola kerjasama dan kemitraan dalam mendukung arah kebijakan umum pemerintah Kota Sukabumi termasuk revitalisasi RSPD dan Majalah Berita Kota dapat dilihat pada Tabel 3.3.2.

**Tabel 3.3.2.**  
**INDIKATOR SASARAN FUNGSI DAN PERAN MEDIA MASSA (CETAK/ELEKTRONIK)**  
**MELALUI REVITALISASI RSPD DAN CETAK MAJALAH BERITA KOTA**

NO	INDIKATOR SASAAN	Satuan	Tahun 2008			Tahun 2009			Evaluasi (+/-)
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terlaksananya hubungan kerjasama dan kemitraan dengan media massa baik cetak maupun elektronik : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektifnya siaran RSPD.</li> <li>• Belanja Cetak dan distribusi Majalah Berita Kota</li> </ul>	Radius/ Km	30	30	100	40	48	120,0	+ 20,0
		Jml Pddk [jiwa]	281.148	154.631	55,0	281.148	168.689	60,0	+ 5,0

Catatan :  
 a. Penggunaan komponen pemancar " Lampu TX EIMAC 3 CX 5000 A 7" dengan lama pakai ± 8000 jam/1 tahun dan kapasitas maksimum/kondisi ideal yang dapat digunakan adalah sebesar 1500 watt, maka dapat dipastikan radius siar RSPD dapat melampaui wilayah Kota Sukabumi seluas ± 48 Km => menurut survey dan data fans yang masuk, siaran RSPD dapat diterima di daerah Cibadak, Pelabuhan Ratu dan daerah Kabupaten Sukabumi lainnya.  
 b. Bahwa dengan kondisi tersebut memungkinkan RSPD untuk mengurangi kapasitas pakai dari 1500 watt diturunkan ke kapasitas 800 watt, alasan tersebut dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :  

- Dengan pemakaian kapasita 800 watt sudah dapat mengkaper luas wilayah Kota Sukabumi ± 48 Km;
- Penghematan masa pakai lampu TX sehingga punya keleluasan waktu penggantian pada belanja modal komponen tersebut pada tahun berikutnya.

 c. Penurunan kapasitas tersebut dapat mengurangi Interference [ gangguan ] bagi radio – radio lainnya;  
 d. Distribusi Berita Kota sudah menjangkau seluruh kelurahan dan sebagian stakeholder [pemangku kepentingan], yang memungkinkan bertambahnya jumlah akses masyarakat terhadap informasi.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja terhadap indikator sasaran Memaksimalkan fungsi dan peran media massa (cetak/elektronik) melalui pola kerjasama dan kemitraan dalam mendukung arah kebijakan umum pemerintah Kota Sukabumi termasuk revitalisasi RSPD dan Majalah Berita Kota dengan kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperoleh gambaran angka pencapaian kinerja sebesar 100% yang menunjukkan pencapaian kinerja yang baik.

**3.3.3 Sasaran dan Indikator 3 :**

Dari hasil evaluasi capaian kinerja terhadap indikator sasaran Pengumpulan data dasar (data base) dari lembaga potensial baik pemerintah, pembangunan kemasyarakatan, meliputi aspek pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek tata ruang dan infrastruktur kota, serta aspek sosial budaya.

Sasaran 3 :  
Meningkatnya presentase penanganan arsip daerah yang sesuai dengan aturan.

Indikator Sasaran 3 :  
Presentase SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku.

Indikator yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah tertatanya arsip daerah secara terpadu sesuai dengan sistem pengelolaan kearsipan. Sasaran ini dilaksanakan melalui masing-masing satu program dan satu kegiatan yakni :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi :

Pengumpulan Data :

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Prosentase SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran Prosentase SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku, dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip :

Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah :

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Prosentase SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran jumlah SKPD didata ditata dokumen arsipnya, dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.

**Tabel 3.3.3  
INDIKATOR SASARAN PROSENTASE SKPD  
YANG SUDAH MENERAPKAN ATURAN ARSIP SECARA BAKU**

NO	INDIKATOR SASAAN	Satuan	Tahun 2008			Tahun 2009			Evaluasi (+/-)
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku.	SKPD	40	16	40,0	40	20	50,0	+ 10,0

- Catatan :
- a. Pada dasarnya semua SKPD yang menangani kearsipan sudah sesuai dengan aturan yang baku, tapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena belum adanya tenaga [SDM] yang mengelola arsip secara khusus di setiap SKPD. Hal tersebut mengakibatkan arsip tidak tertata dengan baik.
  - b. Aturan yang digunakan secara baku, antara lain :
    - UU RI No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
    - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan akan diberlakukan mulai Tahun 2010;

- Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
- Kepres RI No. 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- Kepmendagri No. 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
- Keputusan Kepala ANRI No. 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Arsip.
- Keutusan Gubernur Jabar No. 7 tahun 2000 Jo. Peraturan Gubernur Jabar No. 40 Tahun 2008 tentang Tata Kearsipan Provinsi Jawa Barat.

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

#### 3.4.1 Rincian Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi bersumber dari APBD Kota Sukabumi Tahun 2009. Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.1.

**Tabel 3.4.1**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS KOTA SUKABUMI**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
2	3	4	
<b>PENDAPATAN</b>	-	-	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
Pajak daerah	-	-	
Retribusi Daerah			
Hasil penglolan kekayaan daerah yg dipisahkan			
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3,244,621,000</b>	<b>3,118,448,154</b>	<b>96,11</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>785,158,000</b>	<b>813,351,567</b>	<b>103,59</b>
Belanja Pegawai	785,158,000	813,351,567	
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2,459,463,000</b>	<b>2,305,096,587</b>	<b>93,72</b>
<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>	<b>829,769,000</b>	<b>788,830,787</b>	<b>95,07</b>
<b>Penyedia jasa surat menyurat</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,190,000</b>	<b>100,0</b>
belanja barang dan jasa	2,190,000	2,190,000	
<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air</b>	<b>28,800,000</b>	<b>15,138,987</b>	<b>52,57</b>
belanja barang dan jasa	28,800,000	15,138,987	
<b>Penyediaan Jasa Peralatan &amp; Kelengkapan Kantor</b>	<b>280,320,000</b>	<b>272,440,000</b>	<b>97,19</b>
belanja barang dan jasa	280,320,000	272,440,000	
<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>5,340,000</b>	<b>5,083,000</b>	<b>95,19</b>
belanja barang dan jasa	5,340,000	5,083,000	
<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	<b>63,200,000</b>	<b>62,550,000</b>	<b>98,97</b>
belanja barang dan jasa	63,200,000	62,550,000	
<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>11,579,000</b>	<b>11,571,300</b>	<b>99,93</b>
belanja barang dan jasa	11,579,000	11,571,300	
<b>Penyediaan barang cetakan &amp; penggandaan</b>	<b>7,474,000</b>	<b>7,274,000</b>	<b>97,32</b>
belanja barang dan jasa	7,474,000	7,274,000	
<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan</b>	<b>2,760,000</b>	<b>2,760,000</b>	<b>100,0</b>
belanja barang dan jasa	2,760,000	2,760,000	
<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUU</b>	<b>353,826,000</b>	<b>353,423,500</b>	<b>99,89</b>
belanja barang dan jasa	353,826,000	353,423,500	
<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>6,720,000</b>	<b>6,720,000</b>	<b>100,0</b>
belanja barang dan jasa	6,720,000	6,720,000	
<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>	<b>67,560,000</b>	<b>49,680,000</b>	<b>73,53</b>
belanja barang dan jasa	67,560,000	49,680,000	

<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>48,540,000</b>	<b>30,620,000</b>	<b>63,08</b>
<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas</b>	<b>48,540,000</b>	<b>30,620,000</b>	
belanja barang dan jasa	48,540,000	30,620,000	
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem</b>	<b>19,680,000</b>	<b>6,889,500</b>	<b>35,07</b>
<b>Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan</b>			
<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</b>	<b>19,680,000</b>	<b>6,889,500</b>	
belanja pegawai	16,440,000	6,889,500	
belanja barang dan jasa	3,240,000	-	
<b>Program Kerjasama Informasi Media Massa</b>	<b>1,226,320,000</b>	<b>1,166,609,300</b>	<b>95,13</b>
<b>Penyebarluasan Inf. Pembangunan Daerah</b>	<b>162,310,000</b>	<b>157,860,000</b>	<b>97,26</b>
belanja pegawai	26,040,000	26,040,000	
belanja barang dan jasa	136,270,000	131,820,000	
<b>Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,064,010,000</b>	<b>1,008,749,300</b>	<b>94,85</b>
belanja pegawai	542,440,000	521,915,000	
belanja barang dan jasa	521,570,000	486,834,300	
<b>Program Pengembangan Komunikasi Inf. Media Massa</b>	<b>301,434,000</b>	<b>278,427,000</b>	<b>92,37</b>
<b>Pembinaan &amp; Pengembangan Jar. Komunikasi Inf.</b>	<b>212,474,000</b>	<b>202,942,000</b>	<b>95,51</b>
Belanja Pegawai	11,860,000	10,960,000	
belanja barang dan jasa	29,760,000	22,850,000	
Belanja Modal	170,854,000	169,132,000	
<b>Pengadaan Alat Studio &amp; Komunikasi</b>	<b>63,545,000</b>	<b>52,070,000</b>	<b>81,94</b>
belanja pegawai	3,240,000	3,040,000	
belanja barang dan jasa	10,805,000	530,000	
belanja Modal	49,500,000	48,500,000	
<b>Pengkajian &amp; Pengembangan Sistem Informasi</b>	<b>25,415,000</b>	<b>23,415,000</b>	<b>92,13</b>
belanja pegawai	330,000	330,000	
belanja barang dan jasa	25,085,000	23,085,000	
<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>17,925,000</b>	<b>17,925,000</b>	<b>100,0</b>
<b>Pengumpulan Data</b>	<b>17,925,000</b>	<b>17,925,000</b>	
Belanja Pegawai	5,342,000	5,342,000	
Belanja Barang dan Jasa	12,583,000	12,583,000	
<b>Program Penyelamatan dan Kelestarian Arsip Daerah</b>	<b>15,795,000</b>	<b>15,795,000</b>	<b>100,0</b>
<b>Pendataan dan Penataan Arsip</b>	<b>15,795,000</b>	<b>15,795,000</b>	
belanja pegawai	7,262,000	7,262,000	
belanja barang dan jasa	8,533,000	8,533,000	
<b>J U M L A H</b>	<b>3,244,621,000</b>	<b>3,118,448,154</b>	<b>96,11</b>

### 3.4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

#### a. Belanja

Anggaran Belanja pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk periode tahun anggaran 2009, terealisasi sebesar Rp. 3.118.478.154,0 atau mencapai 96,11 % dari Anggaran Belanja pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.244.621.000,0. Dengan rincian sebagaimana tabel 3.4.2. berikut ini :

Tabel 3.4.2.  
B E L A N J A

( Dalam rupiah )

NO URUT	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2009	REALISASI 2009	(%)	REALISASI 2008
---------	--------------------	---------------------------------	----------------	-----	----------------

<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.688.282.000,0</b>	<b>2.591.026.154,0</b>	<b>96,38</b>	<b>2.201.916.862,0</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.383.012.000,0	1.381.160.067,0	99,86	1.480.952.162,0
2.1.2	Belanja Barang	1.305.270.000,0	1.209.866.087,0	92,69	720.964.000,0
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan sosial	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>556.339.000,0</b>	<b>527.452.000,0</b>	<b>94,80</b>	<b>973.310.300,0</b>
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	276.019.000,0	255.012.000,0	92,38	312.032.000,0
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	280.320.000,0	272.440.000,0	97,19	661.278.300,0
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	-	-	-	-
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>3.244.621.000,0</b>	<b>3.118.478.154,0</b>	<b>96,11</b>	<b>3.175.227.162,0</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Belanja yang terserap pada tahun anggaran 2008, terjadi penurunan sebesar Rp 56.749.008,0 dengan persentase penurunan mencapai 1,79 %.

Alokasi realisasi anggaran Belanja pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi untuk periode Tahun Anggaran 2009 tersebut, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi anggaran Belanja Operasi pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 2.591.026.154,0 atau mencapai 96,38 % dari anggaran Belanja Operasi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.688.282.000,0. Realisasi anggaran Belanja Operasi tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang secara garis besar diklasifikasikan ke dalam :

- Belanja Pegawai

Realisasi anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.381.160.067,0 atau mencapai 99,86 % dari anggaran Belanja Pegawai yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.383.012.000,0. Alokasi realisasi anggaran Belanja Pegawai untuk periode Tahun Anggaran 2009 tersebut, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Belanja Pegawai sebagai berikut :

*Belanja Pegawai Tidak Langsung*, merupakan realisasi Belanja Pegawai yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar *Rp. 813.381.567,0* atau mencapai *103,59 %* dari anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung yang telah ditetapkan *Rp. 785.158.000,0*, dengan rincian pos-pos realisasi anggaran sebagai berikut :

URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2009	REALISASI 2009	(%)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>785.158.000,0</b>	<b>813.381.567,0</b>	<b>103,59</b>
<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>633.178.000,0</b>	<b>692.576.567,0</b>	
Gaji Pokok PNS	475.989.000,0	515.345.520,0	108
Tunjangan Keluarga	44.305.000,0	49.012.804,0	111
Tunjangan Jabatan 2)	36.040.000,0	44.460.000,0	123
Tunjangan Fungsional	0	0	0
Tunjangan Fungsional Umum	38.860.000,0	39.565.000,0	102
Tunjangan Beras 1)	32.422.000,0	30.980.160,0	96
Tunjangan PPh/Tunj. Khusus	5.545.000,0	13.201.533,0	238
Pembulatan Gaji	17.000,0	11.550,0	68
<b>Tamb. Penghasilan PNS</b>	<b>151.980.000,0</b>	<b>120.805.000,0</b>	
Tamb. Penghasilan berdasarkan beban kerja	57.600.000,0	47.175.000,0	82
Tamb. Penghasilan pemberian uang makan	94.380.000,0	73.630.000,0	78

*Belanja Pegawai Langsung*, merupakan realisasi Belanja Pegawai yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 sebesar *Rp. 567.778.500,0* atau mencapai *94,96 %* dari anggaran Belanja Pegawai Langsung yang telah ditetapkan sebesar *Rp. 597.854.000,0* dengan rincian pos-pos realisasi anggaran ( dapat dilihat pada Surat Pengesahan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2009 ).

- Belanja Barang

Anggaran Belanja Barang sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 terealisasi sebesar *Rp. 1.209.866.087,0* atau mencapai *92,69 %* dari anggaran Belanja Barang yang telah ditetapkan sebesar *Rp. 1.305.270.000,0* Realisasi anggaran Belanja Barang tersebut merupakan bagian dari realisasi anggaran Belanja Langsung dengan rincian (dapat dilihat pada Surat Pengesahan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2009).

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang yang diserap pada Tahun Anggaran 2008, sebesar *Rp. 1.382.243.000,0* terjadi penurunan sebesar *Rp. 172.376.913,0* dengan persentase penurunan mencapai *12,47 %*.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Akan tetapi, tidak seluruh realisasi anggaran Belanja Modal dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, tergantung kepada nilai besaran kapitalisasi yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (*Capitalization Treshold*). Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009, anggaran Belanja Modal pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi terealisasi sebesar Rp. 527.452.000,0 atau mencapai 94,80 % dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan sebesar Rp. 556.339.000,0. Adapun alokasi realisasi anggaran Belanja Modal berdasarkan klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- Belanja Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 *Nihil*.

- Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi anggaran Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 255.012.000,0 atau mencapai 92,38 % dari anggaran Belanja Peralatan dan Mesin yang telah ditetapkan sebesar Rp. 276.019.000,0.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang diserap pada Tahun Anggaran 2008, terjadi penurunan sebesar Rp. 36.013.000,0 dari realisasi sebesar Rp. 312.032.000,0 dengan persentase penurunan mencapai 11,54 %.

- Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi anggaran Belanja Gedung dan Bangunan pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 *Nihil*

- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi anggaran Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 *Nihil*

- Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 272.440.000,0 atau mencapai 97,19 % dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang telah ditetapkan sebesar Rp. 280.320.000,0 anggaran ( dapat dilihat pada Surat Pengesahan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2009 ).

Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang diserap pada tahun anggaran 2008, terjadi penurunan sebesar Rp. 388.838.300,0 dari realisasi sebesar Rp. 661.278.300,0 dengan persentase penurunan sebesar 58,80 %.

c. Surplus / (Defisit)

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Untuk Tahun Anggaran 2009 setelah anggaran perubahan, pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi, adapun realisasi anggaran Surplus/(Defisit) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 menunjukkan defisit anggaran, *Nihil*

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009, hasil dari realisasi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi menunjukkan nilai Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam LRA sebesar ( Rp.3.109.923.347,0 ).

Jika dibandingkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2008, terjadi penurunan sebesar Rp. 52.176,0.

### 3.4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

Aset Lancar

NO	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
1.1.1	Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	8.524.807,0	52.176,0

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 0 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 8.524.807,0, merupakan saldo Kas Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi pada tanggal tersebut yang terdapat pada :

Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi Nomor Rekening 0006. 0419. 6900. 2	8.524.807,0	52.176,0
---	-------------	----------

## Aset Tetap

Penyajian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 (saldo awal Tahun 2009) yang merupakan hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2007, disajikan kembali (*Restated*) berdasarkan hasil rekonsiliasi (koreksi) dan perhitungan ulang antara nilai Aset Tetap Tahun 2008 yang disajikan dalam Neraca pada tanggal tersebut dengan catatan-catatan pendukung maupun keberadaan fisik yang mendasari penyajian nilai Aset Tetap tersebut. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 dinyatakan sebesar Rp. 2.361.538.700,0 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.616.550.700,0 terdiri dari :

NO	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
<b>1.3.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tanah Bangunan Kantor	0	0
	Tanah Rumah Dinas	0	0
	Tanah Pemda Lainnya	0	0
	Tanah Rumah Paramedis	0	0
	Tanah Bangunan Puskesmas	0	0
	Tanah Bangunan Terminal	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>255.012.000,0</b>	<b>1.760.405.000,0</b>
	Alat Berat	0	0
	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	222.100.000,0
	Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0
	Alat-alat Kantor dan RumahTangga	0	803.119.000,0
	Alat-alat Laboratorium	0	0
	Alat Ukur	0	0
	Alat Bengkel	0	0
	Alat Kedokteran	0	0
	Alat Studio dan Komunikasi	52.070.000,0	176.802.000,0
	Peralatan Jaringan/Koneksi	202.942.000,0	473.969.000,0
	Alat Pemancar (Tower RSPD)	0	84.415.000,0
	Alat Keamanan Lainnya	0	0
	Perlengkapan Lainnya (Bukit Tinggi )	0	0
	Peralatan dan Mesin	0	0
	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	0	0
	Alat Kantor Lainnya (Papan Visual)	0	0

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 tersebut sudah mengakui aset pelimpahan PPK-IPM senilai Rp. 388.145.000,0 tetapi belum termasuk Daftar Aset Lainnya khusus Aset tak berwujud berupa Belanja Aplikasi Pusat Informasi Pasar (WB Programing PHP, Perdagangan, Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian yang masing-masing sebesar Rp. 41.398.500,0 atau sebesar Rp. 206.992.500,0.

NO	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
<b>1.3.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>601.133.700,0</b>
	Gedung dan Bangunan Kantor Depo Arda	0	601.133.700,0
<b>1.3.4</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jalan	0	0
	Jembatan	0	0

	Bangunan Air/Irigasi	0	0
	Instalasi/Trotoar	0	0
	Drainase	0	0
	Instalasi Listrik	0	0
	Talud/Turap/Bronjong	0	0
	Bronkap dan Pemasangan Pipa	0	0
	Jaringan Pipa	0	0
	Instalasi	0	0
	Penerangan jalan/PJU/Taman	0	0
	Bangunan Air	0	0
	Pembangunan Sumur Artesis	0	0
<b>1.3.5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Buku Perpustakaan	0	0
	Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	0	0
	Tanaman Jenis Pohon	0	0
	Tanaman Jenis Perdu	0	0
	Tanaman Jenis Dasar	0	0
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0
	Plakat Prasasti	0	0
	Peta	0	0

## b. Dana Cadangan

NO	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
1.4.1	Dana Cadangan	0	0

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2009 *Nihil*

## c. Aset Lainnya

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.033.957.300,0, dan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 761.517.300,0 berupa Aplikasi ICT dan Software Original, (TA 2008 dan 2007), Aplikasi Pusat Informasi Pasar Web Programing PHP, aplikasi sistem Informasi pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian, ( pelimpahan PPK-IPM tahun 2008, Berita Acara Penyerahan tanggal 12-12-2008) yang merupakan hasil realisasi kegiatan pada tahun-tahun anggaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
<b>1.5.4</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>272.440.000,0</b>	<b>761.517.300,0</b>
	1. Kawat/Faximili/internet	272.440.000,0	454.285.800,0
	2. APLIKASI ICT dan Software Original	0	100.239.000,0
	3. Aplikasi Pusat Informasi Pasar	0	41.398.500,0
	4. Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan	0	41.398.500,0
	5. Aplikasi Sistem Informasi Pendidikan	0	41.398.500,0
	6. Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan	0	41.398.500,0
	7. Aplikasi Sistem Informasi Pertanian	0	41.398.500,0

## 3.4.4. Kewajiban

## a. Ekuitas dana

Ekuitas dana lancar sebesar Rp. 8.524.807,0 ( sudah disetorkan ke Kas Daerah, tanggal 11 Januari 2010, Tanda Bukti Setor, terlampir)

Ekuitas dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009 tersebut sebesar Rp. 527.452.000,0 dan Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2008 Rp. 3.022.817.000,0 terdiri dari :

U R A I A N	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
Dana yang diinvestasikan dalam asset tetap	255.012.000,0	2.361.538.700,0
Dana yang diinvestasikan dalam asset lainnya	272.440.000,0	761.517.300,0
<b>Jumlah</b>	<b>527.452.000,0</b>	<b>3.123.056.000,0</b>

b. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

*Aktivitas Operasi* adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan/Arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah sedangkan pengeluaran/ arus ke luar kas aktivitas operasi antara lain berupa belanja Pegawai/Personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas. Kas Bersih Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.688.282.000,0 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2.591.026.154,0, dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	U R A I A N	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)
a.	Arus Kas Masuk	0	0
b.	Arus Kas Keluar	2.688.282.000,0	2.591.026.154,0
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.688.282.000,0</b>	<b>2.591.026.154,0</b>

*Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan* adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang tidak masuk dalam aset. Arus masuk Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan antara lain adalah penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus ke luar kas antara lain arus ke luar kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi per 31 Desember 2009 Nihil dan 31 Desember 2008 *Nihil*.

*Aktivitas Pembiayaan* merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dana dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan aset dan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah dan penjualan investasi permanen lainnya. Sedangkan Arus Keluar Kas

antara lain pembayaran cicilan Utang, pembayaran obligasi pemerintah serta penyertaan modal. Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2009 *Nihil*. *Aktivitas Non Anggaran* merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus masuk kas non anggaran antara lain berupa arus masuk dari penerimaan untuk Pihak ketiga dan kiriman uang masuk, sedangkan arus keluar kas antara lain berupa pengeluaran untuk Pihak ketiga dan kiriman uang keluar. *Nihil*.

### 3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan

#### a) Hambatan

- ✓ Besaran dan struktur Organisasi yang ramping dengan beban tugas yang besar perlu didukung selain dengan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang memadai, juga status kantor seyogyanya menjadi dinas.

#### b) Permasalahan

- ✓ Belum terdayagunakannya seluruh potensi secara optimal;
- ✓ Penyusunan program dan perencanaan yang belum mantap dalam memprediksi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- ✓ Banyaknya mitra kerja wartawan yang belum teridentifikasi dengan jelas;
- ✓ Tingkat koordinasi internal maupun eksternal, hubungan vertikal horizontal maupun diagonal masih perlu ditingkatkan;
- ✓ Belum adanya acuan pembiayaan dalam kegiatan Publikasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti sekalipun dirasakan belum optimal.

Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, dan adanya dukungan dari unsur pimpinan maupun staf pelaksana, ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana kantor dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat.

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi, perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor (LAKIP) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Sukabumi, 15 Januari 2010

Kepala,

**H. OSCAR LESNUSA, SH.,MM.**

Pembina

NIP. 070 004 386

